**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang Penelitian

Hubungan Internasional mencakup rentang isu yang luas, termasuk globalisasi, kedaulatan negara, keamanan internasional, kelestarian lingkungan, proliferasi nuklir, nasionalisme, pembangunan ekonomi, ekonomi global, terorisme, kejahatan terorganisasi, keamanan manusia, intervensionisme asing, dan hak asasi manusia.

Hubungan Internasional adalah ilmu yang mempelajari hubungan antarnegara, termasuk peran segenap negara, organisasi antarpemerintah (IGO), organisasi nonpemerintah internasional (INGO), organisasi non-pemerintah (NGO), kemudian perusahaan multinasional (MNC). Hubungan Internasional merupakan sebuah bidang akademik dan kebijakan publik lalu dapat bersifat positif / normatif, karena keduanya berupaya menganalisis dan merumuskan kebijakan luar negeri negara-negara terpilih.[[1]](#footnote-2)

Organisasi internasional digolongkan kedalam dua kategori, yaitu:

1. Organisasi antar pemerintah (Inter-Governmental Organization/IGO), anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara. Contoh: ASEAN,PBB
2. Organisasi nonpemerintah (Non-Governmental Organization/NGO) anggotanya terdiri dari kelompok-kelompok swasta di bidang keilmuan,keagamaan, kebudayaan,bantuan teknik atau ekonomi, dan sebagainya. Contoh: UNHCR(pengungsi), Palang Merah Internasional[[2]](#footnote-3)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB, [bahasa Inggris](https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris): United Nations, disingkat UN) adalah [organisasi internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_internasional) yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti [Liga Bangsa-Bangsa](https://id.wikipedia.org/wiki/Liga_Bangsa-Bangsa) dan didirikan setelah [Perang Dunia II](https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_II) untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota; saat ini terdapat 193 anggota. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional, dan organisasi antar-negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat. [Palestina](https://id.wikipedia.org/wiki/Palestina) dan [Vatikan](https://id.wikipedia.org/wiki/Vatikan) adalah negara bukan anggota (non-member states) dan termasuk pengamat permanen (Tahta Suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB). [Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Markas_Perserikatan_Bangsa-Bangsa&action=edit&redlink=1) terletak di [Manhattan](https://id.wikipedia.org/wiki/Manhattan), [New York City](https://id.wikipedia.org/wiki/New_York_City), dan memiliki hak [ekstrateritorialitas](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekstrateritorialitas&action=edit&redlink=1).Kantor utama lain terletak di [Jenewa](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kantor_Perserikatan_Bangsa-Bangsa_di_Jenewa&action=edit&redlink=1), [Nairobi](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kantor_Perserikatan_Bangsa-Bangsa_di_Nairobi&action=edit&redlink=1), dan [Wina](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kantor_Perserikatan_Bangsa-Bangsa_di_Wina&action=edit&redlink=1). Organisasi ini didanai dari sumbangan yang ditaksir, dan sukarela dari negara-negara anggotanya. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga perdamaian, dan keamanan dunia, memajukan, dan mendorong penghormatan hak asasi manusia, membina pembangunan ekonomi, dan sosial, melindungi lingkungan, dan menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata.

PBB memenangkan [Hadiah Nobel Perdamaian](https://id.wikipedia.org/wiki/Hadiah_Nobel_Perdamaian) pada tahun 2001, dan beberapa petugas, dan badannya juga telah memperoleh hadiah tersebut. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai efektivitas PBB. Beberapa komentator meyakini organisasi ini berperan penting dalam menjaga perdamaian, dan mendorong pembangunan manusia, sementara komentator yang lain merasa organisasi ini tidak efektif, korup, atau bias.[[3]](#footnote-4) Terlepas dari pendapat – pendapat tersebut, nyatanya memang beberapa lembaga organisasi internasional di bawah naungan PBB berhasil melalukan misinya untuk membantu dan menjaga kemanan manusia.

Keamanan manusia atau Human Security pada dasarnya ditujukan untuk mengembalikan permasalahan keamanan tidak lagi menjadi sebuah konsep yang dibentuk, disusun dan ditetapkan oleh negara sebagai sebuah institusi, melainkan dikembalikan kepada hakekat manusia sebagai manusia sebenarnya yang membutuhkan rasa aman dari segala ancaman apapun baik dari institusi maupun alam. Orientasi dari konsep Human Security ini lebih kepada perlindungan dan jaminan terhadap individu.

Menurut Shinoda, Human Security mempunyai 2 aspek utama:

1. Human security berkaitan dengan kebebasan atau keamanan terhadap ancaman kronik seperti kelaparan, penyakit dan penindasan.
2. Human security berkaitan dengan perlindungan terhadap penderitaan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuh kategori Human Security yaitu:

1. Keamanan ekonomi mengacu pada kenikmatan individu atas pendapatan dasar/basic income, baik melalui pekerjaan yang menguntungkan atau dari jaring pengaman sosial.
2. Keamanan pangan mengacu pada akses individu terhadap makanan melalui aset, pekerjaan, atau penghasilan yang dimilikinya.
3. Keamanan Kesehatan mengacu pada kebebasan individu dari berbagai penyakit dan melemahkan penyakit dan aksesnya kepada perawatan kesehatan.
4. Keamanan lingkungan mengacu pada integritas tanah, udara, dan air, yang membuat manusia betah untuk tinggal/habitable.
5. Keamanan pribadi mengacu pada kebebasan individu dari kejahatan dan kekerasan, khususnya perempuan dan anak-anak.
6. Keamanan komunitas mengacu pada martabat budaya dan perdamaian antar-komunitas di mana individu hidup dantumbuh.
7. Keamanan politik mengacu pada perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.[[4]](#footnote-5)

 Adalah World Food Programme cabang bantuan pangan dari PBB dan organisasi kemanusiaan terbesar di dunia mengatasi kelaparan dan mempromosikan keamanan pangan .WFP menyediakan bantuan makanan untuk rata-rata 80 juta orang di 75 negara setiap tahun. Dari kantor pusatnya di Roma dan lebih dari 80 kantor negara di seluruh dunia , WFP bekerja untuk membantu orang yang tidak mampu menghasilkan atau mendapatkan cukup makanan untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka . WFP adalah anggota dari Perserikatan Bangsa – Bangsa.[[5]](#footnote-6)

 WFP pertama kali didirikan pada tahun 1961 setelah tahun 1960 diadakannya konferensi oleh Food and Agriculture Organization ( FAO ), ketika George McGovern, direktur Food AS untuk Program Perdamaian, mengusulkan pembentukan sebuah program bantuan pangan multilateral . WFP secara resmi didirikan pada tahun 1963 oleh FAO dan Majelis Umum PBB secara eksperimental tiga tahun. Pada tahun 1965, program ini diperluas secara berkelanjutan .[[6]](#footnote-7)

 WFP berusaha untuk memberantas kelaparan dan kekurangan gizi , dengan tujuan akhir dalam pikiran dari menghilangkan kebutuhan untuk bantuan pangan itu sendiri .

Tujuan bahwa WFP berharap untuk mencapai adalah untuk:[[7]](#footnote-8)

1. Menyelamatkan kehidupan dan melindungi mata pencaharian dalam keadaan darurat
2. Dukungan keamanan pangan dan gizi serta membangun mata pencaharian untuk masyarakat yang dilanpa kelaparan tersebut
3. Mengurangi risiko dan memungkinkan orang, masyarakat dan negara untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi mereka
4. Mengurangi malnutrisi dan memutus siklus antargenerasi kelaparan

 Bantuan pangan WFP juga diarahkan untuk melawan defisiensi mikronutrien , menurunkan angka kematian anak , meningkatkan kesehatan ibu , dan memerangi penyakit , termasuk HIV dan AIDS . Program Food-for-Work membantu mempromosikan stabilitas lingkungan dan ekonomi dan produksi pertanian.

Salah satu negara di dunia yang telah lama menderita krisis pangan adalah Ethiopia. Ehiopia juga termasuk dalam 10 negara terlapar di dunia.[[8]](#footnote-9)

Selama beberapa tahun, Ethiopia selalu berada dalam kondisi yang rawan. Di setiap tahun, hasil pertanian tidak ada yang bisa dipanen dan akhirnya pemerintah Ethiopia harus meminta kepada komunitas internasional untuk bantuan darurat.[[9]](#footnote-10) Namun tidak selalu berhasil karena penduduk di Ethiopia hampir seluruhnya membutuhkan bantuan pangan karena krisis yang berkepanjangan. Kebijakan pemerintah Ethiopia dalam hal memberikan proteksi dalam bidang pertanian selalu diinterpretasikan seperti suatu pertemuan. Pada masa lalu, kebijakan saat melakukan promosi pertanian dan juga intervensi mungkin terjadi saat ini dengan memberikan perlindungan terhadap rakyatnya.[[10]](#footnote-11) Orang Ethiopia memiliki rezim yang menempatkan sumber ekonomi Ethiopia pada petani yang merupakan sumber yang potensial pada kemajuan ekonomi dan juga pengurangan jaminan sekuritas dan kemiskinan.[[11]](#footnote-12) Kebijakan yang dijalankan beberapa tahun terakhir ini, termasuk Agriculture Development-Led Industrialisation (ADLI), Sustainable Development and Proverty Reduction Programme (SDPRP), dan juga Plan for Accelerated and Sustained Development End Proverty (PASDEP). Adapun program-program yang mendukung pemerintahan dalam sektor pertanian tetapi juga memiliki aspek pada perlindungan sosial adalah Food Security Programme (FSP) dan mengandalkan Productive Safety Net Programme (PSNP).[[12]](#footnote-13) Ethiopia memiliki Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP), yang dikenal sebagai PASDEP untuk periode 2005-2009, yang mana mengambil langkah ke depan dengan memprioritaskan ketahanan pangan, pembangunan pedesaan, pembangunan manusia dan juga kapasitas pembangunan. Namun PASDEP tidak memperkenalkan beberapa penekanan yang baru, mungkin yang paling signifikan untuk mendorong komersialisasi pertanian sebagai suatu strategi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

Di akhir tahun 1980an, begitu banyak krisis yang terjadi di Ethiopia, yakni : kelaparan, ekonomi yang anjlok, kemunduran militer di Eritrea dan Tigray yang harus dihadapi oleh Derg. Sekitar di pertengahan tahun 1984, musim kemarau mempengaruhi akan krisis pangan di Ethiopia dan sebagian besar yang mengalami keterpurukan ini adalah Ethiopia utara. Hal itu bisa dikatakan bahwa pemerintah lalai memperhatikan kondisi rakyatnya karena tidak tersedianya bahan pangan yang mencukupi kehidupan rakyat negaranya dan pemerintah tidak mendapatkan bantuan. Sekitar tahun 1985, kemarau masih berkepanjangan dan pada awal 1986, krisis pangan sudah benar-benar menyebar ke seluruh Ethiopia. Saat itu, sekitar 5,8 juta jiwa benar-benar tergantung pada pangan bantuan yang diberikan oleh organisasi internasional.[[13]](#footnote-14)

Pada saat krisis akut, WFP mendukung Pemerintah Ethiopia dalam menyelamatkan nyawa. WFP juga mendukung program yang menggunakan bantuan pangan untuk memberdayakan perempuan, mengubah daerah-daerah yang terkena dampak perubahan iklim dan menjaga anak-anak di sekolah. Tujuan WFP adalah untuk memberikan kontribusi untuk agenda Ethiopia lima tahun pembangunan, Pertumbuhan dan Transformasi Rencana, melalui mana pemerintah memerangi kerawanan pangan.[[14]](#footnote-15)

 WFP merupakan mitra utama dalam Program Produktif Ethiopia Safety Net (PSNP) dan membantu 1,6 juta penduduk pedesaan dalam menghasilkan aset masyarakat. Diluncurkan pada tahun 2005, PSNP menyediakan transfer makanan atau uang tunai, atau kombinasi keduanya, untuk membantu orang yang rentan menjembatani musim ramping dan untuk memastikan mereka tidak harus menjual aset mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Sebagai gantinya, mereka berpartisipasi dalam pekerjaan umum seperti manajemen sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur sosial dasar (jalan penghubung di pedesaan, sekolah atau klinik).[[15]](#footnote-16)

 Melalui program Sekolah Meals-nya, WFP berencana untuk menyediakan makanan panas untuk lebih dari 600.000 anak sekolah Ethiopia pada tahun 2016. Hal ini mendorong peningkatan partisipasi dan kehadiran, dan mengurangi angka putus sekolah di daerah rawan pangan. Di wilayah selatan Nations, Nationalities dan Masyarakat (SNNPR) dan Oromia, lebih dari 65.000 anak-anak di 105 sekolah telah menerima makanan panas yang terbuat dari makanan lokal berkembang. Makanan dibeli oleh Biro Regional Pendidikan dari serikat terdekat koperasi didukung oleh Pembelian WFP inisiatif Progress. WFP juga membangun kapasitas pemerintah untuk menyediakan makanan sendiri, dan berencana untuk menyerahkan tanggung jawab ini ke program nasional milik selama lima tahun ke depan.[[16]](#footnote-17)

 Pembelian untuk Kemajuan, bertujuan untuk memperkuat kapasitas manajemen dan pemasaran petani kecil. Tahun ini, WFP Membeli 40.000 metrik ton jagung dari petani kecil melalui serikat koperasi. WFP akan menggunakan makanan yang di berbagai program, memotong biaya impor makanan sementara meningkatkan ekonomi lokal.

 WFP menawarkan suplemen gizi khusus untuk sekitar 2,2 juta orang Etiopia yang paling rentan , termasuk wanita hamil , ibu menyusui , balita dan orang yang hidup dengan HIV / AIDS . WFP terus memperluas cara memberikan bantuan di Ethiopia , seperti melalui uang tunai dan bantuan berdasarkan voucher - untuk bantuan , pengungsi dan operasi HIV / AIDS .[[17]](#footnote-18)

 Analisis Kerentanan WFP dan Pemetaan Unit ( MVA ) telah mengembangkan alat peringatan dini untuk memperkuat perjuangan Ethiopia melawan kerawanan pangan dan membantu pergeseran Pemerintah terhadap manajemen risiko bencana proaktif . WFP juga melayani komunitas kemanusiaan yang lebih luas di Ethiopia , terutama dengan membangun pusat logistik baru di Djibouti dan operasi PBB Kemanusiaan Air Service ( UNHAS ) , yang digunakan oleh banyak lembaga dan organisasi lainnya.

 Atas dasar uraian di atas, maka dalam penelitian ini penuslis memutuskan untuk mengambil judul **PERAN WORLD FOOD PROGRAMME DALAM MENANGANI KRISIS PANGAN DI ETHIOPIA**

* 1. **Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang sudah diuraikan oleh penulis, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran WFP di Ethiopia?
2. Bagaimana kondisi krisis pangan yang terjadi di Ethiopia?
3. Apa saja upaya WFP dalam menangani krisis pangan di Ethiopia?
	* 1. **Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi permasalahan dengan hanya mengkaji peran WFP dalam menangani kelaparan sebagai akibat dari krisis pangan yang terjadi di Ethiopia. Pembatasan periodisasi waktu dari tahun 2012-2015.

* + 1. **Rumusan Masalah**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, diperlukan adanya perumusan secara operasional sebagai *research problem* dari masalah yang di deskripsikan diatas, dengan memakai landasan dan identifikasi masalah serta pembatasan masalah untuk memudahkan penganalisaan permasalahan yang sedang dibahas. Untuk itu penulis merumuskan *research problem* dari permasalahan tersebut sebagai berikut: **Bagaimana program Food for Assets, Purchase for progress, School Meals dari World Food Programme dalam menangani krisis pangan di Ethiopia?**

* 1. **Tujuan dan Kegunaan Peneltian**
		1. **Tujuan Penelitian**
1. Untuk mengetahui peran WFP di Ethiopia
2. Untuk mengetahui kondisi krisis pangan di Ethiopia
3. Untuk mengetahui upaya-upaya WFP dalam menangani krisis pangan di Ethiopia
	* 1. **Kegunaan Penelitian**
4. Memberikan gambaran tentang peran WFP di Ethiopia
5. Memberikan gambaran tentang kondisi krisis pangan di Ethiopia
6. Memberikan gambaran upaya WFP dalam menangani krisis pangan di Ethiopia
	1. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
		1. **Kerangka Teoritis**

Dalam bagian kerangka teoritis ini, penulis akan mengemukakan batasan-batasan berupa kutipan teori-teori dan konsep-konsep dari para ahli yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti penulis. Kerangka teoritis diharapkan dapat mengukur pengetahuan baik secara teratur ataupun sistematis. Dengan kata lain, teori akan membantu membentuk kerangka pemikiran dalam upaya memaksimalkan penelitian. Pemaparan dibawah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi analisa suatu kasus secara lebih mendalam.

Dalam ilmu sosial manusia dipandang sebagai makhluk sosial yang melakukan aktifitas kehidupan bersama dengan manusia lainnya. Kegiatan berinteraksi sosial ini adalah bentuk umum dan syarat utama terjadinya proses sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara perseorangan dengan perseorangan, atau antar kelompok manusia, maupun antara orang perseorangan dengan kelompok[[18]](#footnote-19).

 Hubungan sosial tersebut kemudian meluas sehingga membentuk suatu sistem yang dinamakan negara, berkembang melewati batas antar negara, sehingga pada akhirnya membentuk suatu sistem global yang disebut dengan sistem internasional (*international system).*

Fenomena ini lalu diamati dan dipelajari oleh penstudi hubungan dan memunculkan studi hubungan internasional. Studi hubungan internasional terdiri atas paradigma-paradigma yang muncul atas fenomena-fenomena yang terjadi dalam perkembangan hubungan internasional itu sendiri.

 Hubungan Internasional secara sempit dipaparkan oleh **Robert Jackson** dan **Georg Sorensen** sebagai hubungan timbal balik antar semua unsur dalam satu negara lain, pada tahap awalnya tanpa harus terkait langsung dengan konteks kekuasaan atau power dan negara dan konteks trias politikanya.[[19]](#footnote-20)

 Dan definisi menurut Suwardi Wiriatmadja, dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* yang dikutip dari Tryge Matheisen, yaitu Hubungan Internasional adalah bidang spesialisasi aspek internasional dari beberapa cabang ilmu pengetahuan, sejarah baru dan politik internasional[[20]](#footnote-21).

 Selain itu, **Norman D. Palmer** dan **Howard C. Perkins**, dalam bukunya *Methodology in the Study of International Relation,* memaparkan:

**“Hubungan Internasional berkaitan erat dengan segala interaksi di antara negara-negara baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negaranya. Hubungan Internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar bangsa atau negara saja tetapi juga menyangkut aspek-aspek lain. Interaksi yang terjadi antara negara-negara beserta dengan segala aspek-aspeknya merupakan sebuah hakekat dari Hubungan Internasional[[21]](#footnote-22)”**

Hubungan Internasional dewasa ini tidak terlepas dari peran organisasi internasional. Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional (dunia) secara sukarela atau dasar kesamaan yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia dalam tananan hubungan internasional. Dan yang harus kita garis bawahi adalah bahwa anggota-anggota yang membentuk organisasi inetrnasional tersebut harus memiliki visi dan tujuan yang sama walaupun nantinya untuk misi akan didiskusikan kembali.
Pengertian organisasi internasional menurut **D.W. Boweet** merupakan:

**“organisasi yang dibentuk secara permanen yang didirikan atas dasar sebuat traktat (kesepakatan) yang lebih bersifat multilateral daripada bilateral dengan tujuan-tujuan tertentu.”**

Kemudian ada juga pengertian lainnya seperti yang diungkapkan oleh **J. Pariere** Mandalangi yaitu

**“suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan atas sebuah perjanjian yang bersifat tertulis yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya tiga negara atau pemerintah atau organisasi-organisasi internasional yang sudah ada.”[[22]](#footnote-23)**

World Food Programme melakukan berbagai macam upaya melalui program yang dimilikinya. WFP merupakan sebuah organisasi internasional yang bernaung dibawah PBB. Istilah organisasi internasional mempunyai dua arti yang berhubungan namun berbeda. Pertama, istilah itu dapat dianggap sebagai sinonim dari lembaga intenasional. Seperti PBB, dapat disebut sebagai sebuah organisasi internasional atau sebuah lembaga internasional (atau kelompok lembaga). Dalam konteks lain organisasi internasional mengacu pada proses politik internasional yang utama. Dalam proses ini negara-negara anggota berusaha, melalui tindakan-tindakan kolektif dan percobaan diplomatik, mempermudah transaksi di antara mereka.[[23]](#footnote-24)

Dalam buku “International Organization: Basic and Principles”, organisasi internasional didefinisikan sebagai bentuk interaksi antar pihak-pihak tertentu, yaitu aktor negara dan aktor non-negara, yang kemudian dilembagakan sehingga mempunyai asas, tujuan, pengurus dan anggota.[[24]](#footnote-25)

Organisasi internasional terbagi atas dua kategori utama yaitu Inter Governmental Organization (IGO) dan Non-Governmental Organization (NGO). IGO adalah organisasi yang didirikan beberapa negara untuk mencapai tujuan bersama. Ciri-ciri IGO adalah dibentuk oleh dua negara atau lebih, Bersidang secara teratur, mempunyai sifat yang tetap dan keanggotaannya sukarela. IGO dapat diklarifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan keanggotaan dan tujuan, yaitu:[[25]](#footnote-26)

1. Organisasi yang keanggotaannya dan tujuannya umum (general membership and general purpose), misalnya PBB. Organisasi ini mempunyai ruang lingkup global dan melakukan berbagai fungsi seperti keamanan, kerjasama ekonomi, sosial dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Organisasi yang keanggotaannya umum dengan tujuan terbatas (general membership and limited purpose) yang juga dikenal sebagai organisasi fungsional karena bergerak dalam suatu bidang yang spesifik, misalnya World Health Organization (WHO), United Nations Development Program (UNDP), dan lain-lain
3. Organisasi yang keanggotaannya terbatas dengan tujuan umum (limited membership and general purpose). Organisasi ini merupakan organisasi regional yang memiliki fungsi dan tanggung jawab keamanan misalnya Association of South East Asian Nations (ASEAN), Liga Arab, dan lain-lain
4. Organisasi yang keanggotaannya terbatas dan dengan tujuan yang terbatas juga (limited membership and limited purpose). Organisasi ini dibagi atas organisasi sosial, ekonomi, militer, pertahanan, dan lain-lain. Misalnya North Atlantic Treaty Organization (NATO), North American Free Trade Agreement (NAFTA), dan lain-lain.

Melihat dari keanggotaan dan tujuan yang dimiliki, WFP termasuk dalam IGO, dan keanggotaannya umum dengan tujuan terbatas (general membership and limited purpose). Sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, organisasi internasional dapat diklarifikasikan menjadi high politics dan low politics[[26]](#footnote-27)

High politics termasuk didalamnya bidang diplomatik, militer dengan security dan sovereignity. Sedangkan low politics adalah aktivitas dalam bidang sosial, ekonomi, budaya dan teknik, dimana dalam lingkup ini masih dibagi dalam tiga bidang, yaitu:[[27]](#footnote-28)

1. Peran utamanya dalam bidang manajemen dan pembangunan misalnya Bank Dunia, UNDP, IMF.
2. Peran utamanya dalam bidang konflik dan fungsional, seperti International Civil Aviation Organization (ICAO), International Telecommunication Union (ITU), dan lain-lain.
3. Peran utamanya dalam bidang sosial dan kultural, seperti International Labour Organization (ILO), WHO, dan lain-lain.

Adanya anggapan bahwa bahwa semua kelompok yang terorganisir sebagai aktor politik potensial dan menganalisa proses dimana aktor memobilisasi dukungan untuk mencapai tujuan kebijakan disebut pendekatan Pluralisme.

Pluralisme melihat adanya peran penting dari organisasi internasional, organisasi pemerintahan, dan juga perusahaan. Aktor non negara inilah yang bisa menghasilkan pembicaraan mengenai isu-isu baru dan isu-isu yang lebih dinamis. Pemikiran yang sama juga disampaikan oleh Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi. Ada empat asumsi penting bagaimana pendekatan pluralisme melihat hubungan internasional. Asumsi tersebut adalah, aktor aktor non negara adalah entitas penting dalam politik dunia, negara bukan aktor kesatuan, pendekatan pluralis juga menanatang asumsi realis mengenai negara sebagai aktor rasional, serta asumsi bahwa agenda politik internasional itu luas.[[28]](#footnote-29) Pendekatan pluralism menghantarkan pada pemikiran bahwa isu yang dibahas sekarang ini sudah bukan lagi isu yang high politics melainkan low politics.

Menurut **Le Roy Bennet**, organisasi internasional mempunyai dua fungsi utama yakni untuk sarana kerjasama antara negara dalam daerah-daerah dimana kerjasama menyediakan keuntungan untuk sebagian besar negara. Fungsi lainnya untuk menyediakan saluran komunikasi antara pemerintah sehingga wilayah akomodasi dapat dieksplorasi dan akses yang mudah akan tersedia untuk menangani permasalahan tersebut. Konsep dasar dari organisasi internasional adalah untuk bekerjasama dan mengatur regulasi. Salah satu bentuk kerjasama tersebut adalah kerjasama sosial, seperti WFP. Teori peranan memfokuskan pada perilaku individual dan suatu kelompok tertentu. Faktor-faktor tertentu ini dipelajari pada konteks kelompok kerja, organisasi, komunitas, dan masyarakat.

Analisis peranan menguji berbagai masalah sebagai suatu proses dan fase dari sosialisasi, ketergantungan antara individual, karakteristik dan posisi organisasi internasional, proses penyesuaian dan sangsi, spesialisasi pekerjaan dan pembagian kerja. Teori peranan memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik. Pertama, aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan perilakunya dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Kedua, teori peranan mempunyai kemampuan mendeskripsikan institusi politik yang merupakan serangkaian pola perilaku berkaitan dengan peranan.[[29]](#footnote-30) Peranan dapat berarti bagian dari tugas utama yang harus dijalankan. Dari konsep peranan ini muncul istilah peran. Berbeda dengan peranan yang sifatnya mengkristal, peran bersifat insidental.

Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang dimiliki oleh orang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu :[[30]](#footnote-31)

* 1. Sebagai arena

Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi.

* 1. Sebagai instrumen.

Organisasi internasional digunakan oleh negaranegara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.

* 1. Sebagai aktor independen

Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.

Ethiopia sebagai salah satu anggota WFP menjadikan organisasi tersebut sebagai arena atau tempat untuk membicarakan permasalahan pangan yang melanda dan menjadikan WFP sebagai instrumen untuk dapat membantu pemerintah Ethiopia dalam menyelesaikan permasalahan pangan tersebut.

Krisis pangan dalam **teori Malthus, krisis pangan dalam arti persediaan terbatas sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi semua penduduk dunia.** [[31]](#footnote-32)

Dalam menjalankan fungsinya negara-negara anggota WFP bekerjasama untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan melakukannya tanpa adanya pengaruh dari pihak diluar WFP.

 Sebagai akibat dari krisis pangan makam munculah masalah kelaparan. Definisi kelaparan sendiri ialah kelangkaan luas makanan, yang disebabkan oleh beberapa faktor termasuk kegagalan panen , ketidakseimbangan populasi , atau kebijakan pemerintah.[[32]](#footnote-33)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memaparkan asumsi bahwa:

1. Krisis pangan di Ethiopia sudah sangat parah karena Ethiopia termasuk dalam 10 negara terlapar di dunia
2. Banyak program yang ditawarkan WFP kepada pemerintah Ethiopia untuk menangani krisis pangan Ethiopia salah satunya melalui Food Assistance for Assets ( FFA )
3. Dengan adanya WFP, masalah krisis pangan di Ethiopia sedikit demi sedikit dapat teratasi
	* 1. **Hipotesis**

Berdasarkan uraian dan asumsi yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: **Jika WFP turut andil dengan program – program seperti Food For Assets, Purchase for progress, School Meals dan lainnya maka tingkat krisis pangan di Ethiopia akan berkurang.**

* + 1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variable dalam hipotesis (teoritik) | Indikator (empiric) | Verifikasi (analisis) |
| Adanya World Food Programme (WFP)Krisis Pangan Ethiopia Keberhasilan WFP dalam menangani krisis pangan di Ethiopia | 6 Program WFP:* Cash and vouchers
* Food For Assets
* HIV/AIDS
* Purchase for progress
* School Meals
* Centre of Excellence

Kelaparan di Ethiopia1. Menjadikan Masyarakat Ethiopia yang Mandiri
 | "Bantuan makanan kami mencapai jutaan orang di Ethiopia setiap tahun , dan jika kita dapat menggunakan daya beli kami untuk membuat perubahan jangka panjang untuk membangun ketahanan di Ethiopia , maka kita akan benar-benar berguna di sini , " kata Abdou Dieng , direktur untuk WFP Ethiopia .(<https://www.wfp.org/purchase-progress/news/blog/record-purchase-p4p-supported-farmers-ethiopia>, diakses 10 Juni 2016)Menurut Dokumen 2016 Persyaratan Kemanusiaan , 10,2 juta orang di Ethiopia membutuhkan bantuan makanan darurat ; banyak yang memerlukan dukungan sampai panen raya berikutnya di akhir tahun . WFP bertugas mendukung Pemerintah Ethiopia dalam memenuhi kebutuhan 7,6 juta orang.(<https://www.wfp.org/countries/ethiopia>)WFP, “Kami bangga untuk mengatakan bahwa setelah upaya tiga tahun, lebih dari 1.000 perempuan bergabung di empat koperasi yang baru diperuntukan untuk perempuan. Lebih dari 110 ton jagung dan 18 ton biji dikirim ke WFP dari koperasi tersebut, dan - kondisi cuaca memungkinkan - petani wanita yakin bahwa mereka dapat meningkatkan produksi lebih jauh. Kapasitas dari Ethiopia mandiri berkembang.”(https://www.wfp.org/content/annual-report-Ethiopia-2014) |

* + 1. **Skema Kerangka Teoritis**
	1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
		1. **Tingkat Analisis**

Dalam penulisan skripsi ini, Unit Variabel Dependen (variabel yang dipengaruhi) yaitu: Krisis Pangan di Ethiopia. Sedangkan, Unit Variabel Independen yang dijadikan sebagai Unit Eksplanasi, yaitu: Peran World Food Programme (WFP).

Penggunaan tingkat analisis dalam penelitian ini adalah Analisa induksionis yang unit eksplanasi lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan unit analisis.

* + 1. **Metode Penelitian**

Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu:

1. Metode Deskriptif: Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dimana penulis mencoba menggambarkan masalah yang muncul secara sistematis dengan ilmu hubungan internasional, terutama mengenai eksistensi bahasa di dalam sistem hubungan internasional. Selain itu juga menerangkan hubungan, menguji hipotesa-hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan[[33]](#footnote-34).
2. Metode Historis: Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis suatu fenomena –fenomena atau kejadian di masa lampau secara generalis di dalam memahami situasi sekarang dan kemungkinan dapat berkembang di masa yang akan datang berdasarkan sumber data sekunder.
	* 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah teknik pengumpulan dokumen atau data historis karena sesuai dengan kondisi yang ada, dikarenakan tidak dapat berhubungan langsung dengan pihak negara terkait yang sedang dibahas, karena keterbatasan dana. Dokumen historis yang dimaksud yaitu berupa buku-buku, artikel majalah, surat kabar, jurnal, serta data dari website terpercaya, yang berhubungan dengan penelitian.

* 1. **Lokasi dan Lama Penelitian**
		1. **Lokasi Penelitian**
	2. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung

Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung Tlp. (022) 4205945 – 4262456 / Fax. (022) 4205945 – 4210656. Website: <http://fisip.unpas.ac.id/>

* 1. Perpustakaan Pusat Universitas Katolik Parahyangan Gedung 9 Lantai 2 & 3

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung Tlp. (022) 2032655 ext / voip. 190202. E-mail: perpust@unpar.ac.id

* 1. Badan Perpustakaan Daerah Jawa Barat

Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4, Bandung, Jawa Tengah 40285. Website: <http://bapusipda.jabarprov.go.id/perpustakaan>

* + 1. **Lama Penelitian**

 Penelitian dikerjakan selama 6 bulan sesuai dengan *deadline*  yang diberikan pihak kampus, terhitung sejak 22 Desember 2015 hingga 22 Juni 2016.

* 1. **Sistematika Penulisan**

 Rencana penulisan usulan penelitian ini dibagi dalam lima bab dengan lingkup pembahasan sebagai beriku:

**BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah yang diteliti, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, serta lokasi dan waktu penelitian.

**BAB II** **OBJEK PENELITIAN FARIABEL BEBAS**

Bab II ini akan membahas uraian atau informasi umum mengenai tema yang dijadkan variabel bebas, yaitu konsep yang menjelaskan dan meramalkan masalah tersebut. Adapun yang menjadi variabel bebasnya adalah mengenai Peran World Food Programme.

**BAB III OBJEK PENELITIAN VARIABEL TERIKAT**

Bab III ini berisi uraian atau informasi umum mengenai masalah yang menjadi variabel terikat yaitu konsep yang hendak dijelaskan kejadiannya dan terjadi akibat variabel lain. Dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi variabel terikatnya adalah Krisis Pangan di Ethiopia.

**BAB IV VERIFIKASI DATA**

Dalam bab ini berisi pembahasan, menguraikan serta menjawab hipotesis dan indokator-indikator penelitian yang di deskripsikan dalam data (fakta maupun angka)

**BAB V KESIMPULAN**

Dalam bab ini akan dipaparkan beberapa kesimpulan atau hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam bentuk ringkasan yang singkat namun masih informatif.

1. “Pengertian Hubungan Internasional Menurut Para Ahli Paling Lengkap”, dalam [*http://www.dosenpendidikan.com/22-pengertian-hubungan-internasional-menurut-para-ahli-paling-lengkap/*](http://www.dosenpendidikan.com/22-pengertian-hubungan-internasional-menurut-para-ahli-paling-lengkap/), diakses pada tanggal 1 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-2)
2. “Peranan Organisasi Internasional”, dalam *kuceng-kun.blogspot.com/2012/03/peranan-organisasi-internasional-dalam.html*, diakses pada tanggal 1 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-3)
3. “Perserikatan Bangsa-Bangsa”, dalam [*https://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan\_Bangsa-Bangsa*](https://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa), diakses pada tanggal 1 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-4)
4. “Human Security”, dalam [*https://muhammadchoirulrosiqin.wordpress.com/2014/05/12/human-security/*](https://muhammadchoirulrosiqin.wordpress.com/2014/05/12/human-security/), diakses pada tanggal 1 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-5)
5. “World Food Programme”, dalam [*https://en.wikipedia.org/wiki/World\_Food\_Programme*](https://en.wikipedia.org/wiki/World_Food_Programme) diakses pada tanggal 3 Juni 2016 [↑](#footnote-ref-6)
6. “About”, dalam [*http://www.wfp.org/about*](http://www.wfp.org/about) diakses pada tanggal 3 Juni 2016 [↑](#footnote-ref-7)
7. “Our Work”, dalam [*http://www.wfp.org/our-work*](http://www.wfp.org/our-work) diakses pada tanggal 3 Juni 2016 [↑](#footnote-ref-8)
8. “10 Negara Paling Lapar di Dunia”, dalam [*https://cauchymurtopo.wordpress.com/2014/03/14/10-negara-paling-lapar-di-dunia*](https://cauchymurtopo.wordpress.com/2014/03/14/10-negara-paling-lapar-di-dunia), diakses pada tanggal 3 Juni 2016 [↑](#footnote-ref-9)
9. FAO: *“Towards Eliminating Hunger”, Report* hal. 42 [↑](#footnote-ref-10)
10. Devereux, Stephen & Bruce Guenther, Jurnal *“Social Protection and Agriculture in Ethiopia”*,(Institute Development Studies, University of Sussex, 2007), hal.3 [↑](#footnote-ref-11)
11. Ibid, hal. 4 [↑](#footnote-ref-12)
12. Ibid, hal.5 [↑](#footnote-ref-13)
13. Ofcansky, Thomas P. & LaVerle Berry, *“Ethiopia, A Country Study”*, (Kessinger Publishing, LLC, 1991), hal.67. [↑](#footnote-ref-14)
14. “Ethiopia”, dalam [*https://www.wfp.org/countries/ethiopia*](https://www.wfp.org/countries/ethiopia), diakses pada tanggal 1 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-15)
15. ibid [↑](#footnote-ref-16)
16. ibid [↑](#footnote-ref-17)
17. ibid [↑](#footnote-ref-18)
18. C. A. Mcleland, *Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem,* Terjemahan: Mien Joebnacer, (Jakarta: PT. Rajawali,1981), hal. 27 [↑](#footnote-ref-19)
19. Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hal. 1-28 [↑](#footnote-ref-20)
20. Suwardi Wiriatmadja, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Surabaya: Pustaka Tinta, 1967) hal. 1 [↑](#footnote-ref-21)
21. Norman D. Palmer dan Howard C. Perkins, *Methodology in the Study of International Relation* (New York, USA: Hall, Inc. Englewood Cliffs, 1986) hal. 14 [↑](#footnote-ref-22)
22. “Definisi Dari Organisasi Menurut Ahli”, dalam [*http://teori-organisasi-umum-1.blogspot.co.id/2013/05/definisi-dari-organisasi-menurut-10.html*](http://teori-organisasi-umum-1.blogspot.co.id/2013/05/definisi-dari-organisasi-menurut-10.html), diakses pada tanggal 1 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-23)
23. Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional*, (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1993), hlmn. 367. [↑](#footnote-ref-24)
24. A. Leroy Bennet, *International Organization : Basic and Principles*, (New Jersey : Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1988), hlmn. 3 – 4. [↑](#footnote-ref-25)
25. Kelly Kate Pease, *International* *Organization:Perspective on Governance in Twentieth First Century*, (New Jersey: Prenctice Hall. Inc., 2000), hlmn. 276. [↑](#footnote-ref-26)
26. James Rossenau and Kenneth Thompson, *World Politics: An Introduction*, (New York: Macmilian Publishing Inc., 1976) hlmn.628. [↑](#footnote-ref-27)
27. Ibid., hlm. 629 – 639. [↑](#footnote-ref-28)
28. Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations Theory:Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*. Cetakan ke Tiga, (USA, 1999) hlm 199-200 [↑](#footnote-ref-29)
29. Bruce J. Biddle & Edwin J. Thomas, *Role Theory Concepts and research*, (New York : Robert E. Krieger Publishing Company, 1979) hlmn. 3-17. [↑](#footnote-ref-30)
30. Clive Archer, *International Organization: Principles and Issues*, (New Jersey: Prentice Hall Inc., 1997) hlmn 130 – 147. Dikutip dari Anak Agung Banyu Perwita dan Dr. Yanyan Mochammad Yani, PIHI, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005) hlm. 95. [↑](#footnote-ref-31)
31. [*http://kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-3024-01082008.pdf*](http://kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-3024-01082008.pdf), diakses pada tanggal 9 Juni 2016 [↑](#footnote-ref-32)
32. James Kelly,[*"Scarcity and Poor Relief in Eighteenth-Century Ireland: The Subsistence Crisis of 1782-4"*](http://www.jstor.org/discover/10.2307/30008004?uid=3738032&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21100863504381). *Irish Historical Studies* ([Cambridge University Press](https://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_University_Press), 1992)hal. 28 [↑](#footnote-ref-33)
33. Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988) hlm. Bab II [↑](#footnote-ref-34)